

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER  
DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)**

**Oleh :**

**Ade Saputra**

**Pembimbing : Raja Adri Satriawan Surya dan Supriono**

*Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*e-mail : [ade.saputra789@yahoo.com](mailto:ade.saputra789@yahoo.com)*

*The Effect Of Implementation accounting standard, Internal control system and  
Human Resources Competencies at the quality  
of financial statement.*

*(Study in the SKPD's Government Of Kampar)*

**ABSTRACT**

*This present study was intended to identify the impact of the implementation of government standard accountancy, the system of internal control, and the competency of accounting staff on the quality of the financial statement of the regency government of Kampar. The study was conducted at SKPD government of Kampar' (departments of the regency government of Kampar). The sample was determined using Sampling Purposive Technique and the respondents totaled 96. The data used were the primary data. The data were collected through questionnaire. The data were analyzed using the multiple linear regression analysis assisted with the SPSS version 20.00 program. The result of this study indicated that the government accounting standard, internal control system and the human resources competencies and has significantly effect on quality of financial statement. The magnitude of the effect ( $R^2$ ) the government accounting standard, internal control system and the human resources competencies on the quality of the financial statement was 47,7%. While the remaining 52,3% is influenced by other independent variabel that are not observed in this study.*

*Keywords: accounting standard, internal control, competencies, and quality*

**PENDAHULUAN**

Fenomena besar dalam konteks akuntansi sektor publik adalah reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga dinegara-negara lainnya. Tuntutan reformasi ini

menyebabkan demokratis pengelolaan organisasi melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, tuntutan ini lebih terkait dengan bidang pengelolaan keuangan publik.

Di Indonesia Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan di daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan

akuntabilitas memaksa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian diberikan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Agar informasi Laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunaannya maka harus memenuhi kualitas tertentu. Informasi yang terdapat dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,, Dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang mana sebagai auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Selain penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tingkat provinsi opini yang paling dominan adalah WTP, yaitu sebanyak 15 LKPD atau sebesar 52%. Di tingkat kabupaten dan kota opini LKPD yang paling dominan adalah WDP, yaitu sebanyak 214 LKPD atau sebesar 63% di

tingkat kabupaten dan sebanyak 50 LKPD atau sebesar 57% di tingkat kota.

Salah satu contohnya adalah pada Pemerintah Kabupaten Kampar dijelaskan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 yang mana dari tahun 2009-2013 LKPD Kabupaten Kampar secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP yang diberikan oleh BPK tersebut diberikan disebabkan oleh, (1) Persediaan. Pada saldo Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 terdapat sejumlah SKPD yang tidak melakukan pencatatan mutasi barang dan stock opname. Belum adanya koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyimpan barang mengenai penyerahan dokumen pendukung atas Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat/ Pihak ketiga. Penyajian nilai persediaan pada Dinas Kesehatan belum mencakup persediaan di Puskesmas dan barang habis pakai. Penyajian nilai persediaan pada RSUD Bangkinang tidak didukung dengan data yang valid; (2) Investasi Jangka Panjang. Investasi jangka panjang per 31 Desember 2013 diantaranya merupakan penyertaan modal pada PDAM tirta Kampar, PD Kampar Aneka Karya, Sebelas Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan sebelas koperasi. Penyertaan modal pada PDAM tirta Kampar dan PD. Aneka Kampar Aneka Karya tidak didukung dengan rincian dokumen yang lengkap dan memadai. Penyertaan modal pada delapan BMT dan delapan Koperasi tidak dapat ditelusuri keberadaan dan kelangsungan BMT dan Koperasi tersebut. Selain penyertaan modal, terdapat investasi jangka panjang non

permanen lainnya berupa dan bergulir dalam bentuk hewan ternak yang belum disajikan dalam laporan keuangan; (3) Aset Tetap. Dari nilai aset tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 terdapat Aset tetap hasil pengadaan s.d. Tahun 2007 yang belum dicatat dengan konsep harga perolehan; (4) Aset Lainnya. Dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 terdapat aset lain – lain yang tidak dapat ditelusuri dan dirinci per jenis. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai persediaan tersebut. ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Selain hal – hal tersebut diatas, pada Buku II BPK RI menemukan menyajikan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya adalah (1) Pengelolaan uang daerah pada BUD belum memiliki pengendalian yang memadai; (2) Nilai persediaan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2013 belum menggambarkan seluruh Saldo Persediaan; (3) Pengelolaan Investasi Non Permanen dan Bergulir belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah; (4) Penatausahaan Investasi Non Permanen dalam bentuk hewan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Berdasarkan fenomena informasi yang di dapat dari IHPS I 2014 tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan Kabupaten Kampar masih belum memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sehingga

pemerintah Kabupaten Kampar perlu membenahi bagian penatausahaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas yang disyaratkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintahan ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. (Nordiawan, 2009:25 )

Berbicara tentang kualitas laporan keuangan, selain diperlukan penerapan Standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal yang baik tetntunya dalam menyusun laporan keuangan diperlukan kompetensi yang baik dari sumber daya manusia.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan

keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) dan Kartika dan Suhardjo (2013). Peneliti mengambil beberapa variabel dari penelitian tersebut, yaitu: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) dan Kartika dan Suhardjo (2013) adalah terletak pada tempat dan tahun penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengambil populasinya yaitu pegawai negeri sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sedangkan yang dilakukan Nurillah dan Muid (2014) dan Kartika dan Suhardjo (2013). meneliti pada pegawai di lingkungan pemerintahan Kota Depok dan pemerintahan Kota tual. Selain itu Nurillah dan Muid (2014) dan Kartika dan Suhardjo (2013). melakukan penelitian pada tahun

2013 dan 2014, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada tahun 2015.

Rumusan permasalahan yang diteliti, adalah: 1) Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar?, 2) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar?, 3) Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar?

Adapun tujuan penelitian adalah: 1) Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah., 2) Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah., 3) Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan adalah apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi

peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. (SAP, 2010).

### **Penerapan Standar Akuntansi**

Salah satu langkah nyata pemerintahan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 ayat 1 mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Aryani. 2013).

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Spencer and Spencer, (1993 : 9) dalam M. Tambunan 2012 Kompetensi adalah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya (*an underlying characteristic's of an individual which is causally related to criterion – referenced effective and or superior performance in a job or situation*).

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan konsep atau aturan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang diterapkan baik di pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut Mahmudi (2010: 19) didalam Stevani (2013) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal standar akuntansi yang diterapkan. Sehingga itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Bastian juga menjelaskan (138;2010) SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

Tujuan dari penerapan standar akuntansi ini adalah menjadi acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi. (Nordiawan, 2009).

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

**H<sub>1</sub>** : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap kualitas laporan keuangan**

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Sukmaningrum (2012), membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas penulis menggunakan kembali variabel Sistem Pengendalian Internal kedalam penelitian dikarenakan perbedaan lokasi geografis dari penelitian terdahulu.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

**H<sub>2</sub>:** Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan.

### **Pengaruh kompetensi sumber daya manusia Terhadap kualitas laporan keuangan**

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Mulid (2014), Kurnia (2013) dan Munteh (2013) yang mampu membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil variabel Kompetensi SDM dikarenakan masih sedikitnya penelitian tentang variabel tersebut, masih terdapat hasil yang

berbeda di lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya serta perbedaan lokasi geografis dengan peneliti sebelumnya.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

**H<sub>3</sub>:** kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **METODE PENELITIAN**

Penetapan daerah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar tepatnya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, dengan pertimbangan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini lebih kurang 2 bulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Staff bagian keuangan dan Bendahara SKPD merupakan pihak yang terkait langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 96 (sembilan puluh enam) orang dari 32 (tiga puluh dua) SKPD yang masing-masing SKPD ada 3 (tiga) responden.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0.

## **Variabel Penelitian dan Pengukurannya**

### **Variabel dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan (Y) adalah Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependan adalah kualitas laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut yang selanjutnya akan dijadikan sebagai indikator.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh M. Tambunan (2012), diukur dengan menggunakan skala likert (*Likert scale*) yang berkaitan dengan 9 (sembilan) item pertanyaan menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Tidak Tahu, (4) setuju, (5) Sangat setuju.

### **Variabel Independen**

Penelitian menggunakan tiga variabel independen yaitu :

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah ( $X_1$ ) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang , yaitu 1) Akuntabilitas; 2) Manajemen; 3) Transparansi dan 4) Keseimbangan Antar Generasi. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala likert, dimana yang dimulai dari skala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”.

b. Variabel sistem pengendalian intern ( $X_2$ ) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mendefinisikan bahwa, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Windiastuti (2013). Setiap responden diminta untuk menjawab 16 (enam belas) item pernyataan menggunakan skala *Likert* dengan 5 poin

c. Kompetensi sumber daya manusia

Variabel kompetensi sumber daya manusia ( $X_3$ ) Menurut Suparno (2001:27), Kompetensi adalah



kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki ketrampilan & kecakapan yang diisyaratkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dalam rangka keperluan penelitian, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar. Dengan mengambil masing-masing 3 responden pada setiap SKPD.

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 96 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 93 (96,875%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 96,875% tersebut, dikarenakan kuesioner disebarkan langsung kepada responden di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut

### Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian yang bertujuan untuk mempermudah memahami data. Statistik deskriptif ini menggambarkan tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintah, sistem Pengendalian Intern, kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan. Statistik disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi

yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan SAP	93	25.00	40.00	33.560	2.74019
Sistem Pengendalian Intern	93	52.00	77.00	66.129	5.35729
Kompetensi SDM	93	32.00	44.00	38.290	3.17798
Kualitas Laporan Keuangan	93	28.00	45.00	37.194	3.22779
Valid N (listwise)	93				

*Sumber: data olahan SPSS 20,2015*

Nilai rata-rata keempat variabel tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

### Hasil Uji Validitas Data

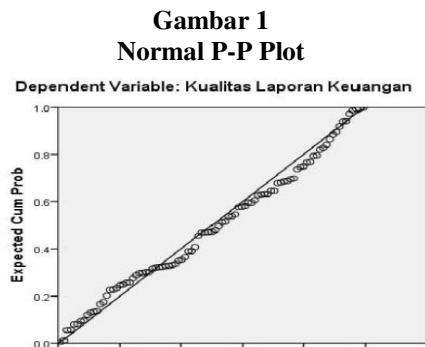
Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan rtabel. Nilai r table diperoleh dengan persamaan  $N-2 = 93-2 = 91 = 0,204$ . Tingkat signifikansi 5%, maka didapat rtabel 0,204. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid jika r hitung > rtabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013:53).

### Hasil Uji Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis

dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,70.

### Hasil Uji Normalitas Data



*Sumber: data olahan SPSS 20,2015*

Dari grafik *P-P Plot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Nilai Tolerance dan VIF**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.769	1.301	Tidak terdapat Multikolonieritas
Sistem Pengendalian Intern	.636	1.573	Tidak terdapat Multikolonieritas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.732	1.366	Tidak terdapat Multikolonieritas

*Sumber: data olahan SPSS 20,2015*

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.841	2.422		.347	.729
Penerapan SAP	.018	.065	.033	.277	.783
Sistem Pengendalian Intern	.029	.036	.106	.799	.427
Kompetensi SDM	-.042	.057	-.091	-.740	.461

a. Dependent Variable: Abs\_res

*Sumber: data primer olahan, 2015*

### Hasil Uji Autokorelasi

Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Durbin-Watson	N	Keterangan
1.734	93	Tidak Terdapat Autokorelasi

Sumber: data primer olahan, 2015

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* pada variabel independen dan variabel dependen menunjukkan nilai 1,734. Dengan demikian, nilai *Durbin-Watson* berada di antara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada variabel independen.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.131	3.783		.563	.575
Penerapan SAP	.318	.101	.270	3.145	.002
Sistem Pengendalian Intern	.170	.057	.282	2.981	.004
Kompetensi SDM	.343	.089	.338	3.838	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: data primer olahan, 2015

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015:97).

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 <sup>a</sup>	.494	.477	2.33328

Sumber: data primer olahan, 2015

### Hasil pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t yang bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dalam penelitian ini lebih jelas disajikan dalam tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7**  
**Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Variabel independen	t hitung	t table	Sig.
Penerapan standar akuntansi pemerintah (X1)	3.145	1.987	.002
Sistem Pengendalian intern (X2)	2981	1987	.004
Kompetensi SDM (X3)	3.838	1.987	.000

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan (Y)

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

### Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap kualitas laporan keuangan

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu (3,145)  $> t_{tabel}$  (1,987) dan  $sig.(0,002) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian kartika dan Adhi (2013) yang mengemukakan bahwa Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan**

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,981 > t_{tabel}$   $1,987$  dan  $sig.(0,004) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian As syifa nurillah dul mulid (2014) yang menunjukkan bahwa variable sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah dengan studi empiris di SKPD Kota Depok

### **Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan**

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $(3,838) > t_{tabel}$   $(1,987)$  dan  $sig.(0,00) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$

diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Choirunisah (2008) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam palaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang akan mengurangi kualitas dari laporan keuangan itu sendiri, diantaranya adalah keandalan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik standar akuntansi yang diterapkan maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

#### 4. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas ruang lingkup penelitian dan penambahan responden yang berkaitan kualitas laporan keuangan.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara serta angket terbuka dalam penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi berbasis akrual berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Yohanes Suharjo. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada pemerintah kota atual). Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 3, Hal, 1-19
- Agustiawan, Vicky. 2013. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*
- Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Satuan Perangkat Kerja Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Halim, Abdul. 2013.
- Aryani, Farida. 2013. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra Kppn Medan II. *Tesis Megieter*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Bastian, Indra., 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- IDagong, Stevani. 2013. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Gorontalo (Studi Kasus DPPKAD Kota Gorontalo)*. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Mardiasmo, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

- M. Tambunan, Paulinus. 2012. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja (SATKER) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*. Skripsi. Semarang).  
Universitas Diponegoro.  
Semarang
- Munteh, Ridha Rizaldy, 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten labuhanbatu*. Universitas Negeri Medan
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta; Salemba Empat
- Nurillah As Syifa dan Muid Dul (2014) *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)* Universitas Diponegoro
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Susilawati, riana. 2014. *Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah STIE STEMBI – Bandung Business School, Bandung*
- Warren, Carl. S, James M. Reeve, Phillip E. Fess, 2005. *Pengantar Akuntansi*, Edisi 21, Penerjemah Aria Farahmita, Amanugrahani, Taufik Hendrawan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Windiastruti, Ruri. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung)*. Skripsi.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

\_\_\_\_\_. Peraturan  
Pemerintah Nomor 60 Tahun  
2008 tentang Sistem  
Pengendalian Intern  
Pemerintah.

-----, Peraturan  
Pemerintah Nomor 71 Tahun  
2010 tentang Standar  
Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, 2004. Undang-  
Undang Nomor 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan  
Daerah.

<http://www.bpk.go.id>